

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEJABAT KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Pada Polda Lampung)

OLEH

Sulthan Zacky Ramadhan Putra

Penegakan hukum terhadap kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan narkoba, menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Sehingga memunculkan permasalahan tentang pertanggung jawaban pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba. sebagai berikut: bagaimana penegakan Hukum Pidana terhadap pejabat kepolisian dalam Tindak Pidana Narkoba dan apakah terdapat faktor penghambat dalam proses pidana terhadap pejabat kepolisian dalam Tindak Pidana Narkoba.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris yang berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulis skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan penegakan hukum pidana terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polda Lampung menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan di depan hukum diterapkan, di mana semua individu, termasuk anggota kepolisian, harus bertanggung jawabkan tindakan mereka di mata hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, bahkan dalam Proses penjatuhan sanksi bagi anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba cenderung lebih berat dibandingkan dengan pelanggar

biasa. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam upaya memberantas narkoba. Penjatuhan sanksi yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan menjaga integritas institusi kepolisian.

Saran Penulis kepada penegak hukum pidana harus dilakukan secara tegas dan maksimal dalam pelaksanaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menjaga citra Polri adapun tujuannya. Bagi kepolisian sebaiknya lebih bisa memantau anggotanya dan lebih menanamkan sikap taat pada hukum yang lebih tinggi agar anggotanya bisa terhindar dari tindak pidana penyalahgunaan narkoba, seperti halnya tes urin. Bagi aparat yang berwenang mengadili dalam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota polisi seharusnya lebih tegas dalam menindak polisi yang terjerat kasus narkoba dengan sesegera mungkin melakukan proses penegakan kode etik yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah diperberat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepolisian, Narkoba

ABSTRACT

CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE OFFICIALS IN DRUG CRIMES

(Study at Lampung Regional Police)

By

Sulthan Zacky Ramadhan Putra

Law enforcement against police officers who commit crimes, such as drug abuse, is a very serious problem in Indonesia. The Indonesian National Police has the task of maintaining domestic security and order and has the authority to conduct investigations and inquiries in matters of law enforcement related to criminal acts. This raises the issue of criminal liability for police officers who commit narcotics crimes. as follows: how is the enforcement of Criminal Law against police officers in Narcotics Crimes and are there any inhibiting factors in the criminal process against police officers in Narcotics Crimes.

The method used by the author in compiling this thesis is by using the normative legal approach method and supported by an empirical legal approach in the form of support from criminal law experts and law enforcers to support normative legal data. The normative legal approach is carried out by observing, examining and interpreting theoretical matters concerning legal principles through literature searches that are directly or indirectly related to the author of this thesis.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that criminal law enforcement against police officers who abuse narcotics in the Lampung Police environment shows that the principle of equality before the law is applied, where all individuals, including police officers, must be held accountable for their actions in the eyes of the law in accordance with applicable laws and regulations, even in the process of imposing sanctions for police officers involved in narcotics abuse tends to be heavier than for ordinary violators. This is due to the fact that they are law enforcement officers who should be role models in efforts to eradicate narcotics. The imposition of heavier sanctions is expected to provide a deterrent effect and maintain the integrity of the police institution.

The author's advice to criminal law enforcers must be carried out firmly and maximally in implementation. This aims to provide a deterrent effect and maintain the image of the police. The purpose is that the police should be able to monitor their members better and instill a higher attitude of obedience to the law so that

Sulthan Zacky Ramadhan Putra

their members can avoid criminal acts of drug abuse, such as urine tests. For the authorities who are authorized to prosecute violations of the code of ethics committed by police officers, they should be more assertive in taking action against police officers who are caught in narcotics cases by immediately carrying out the process of enforcing the code of ethics that are proven to have committed a crime must be made more stringent.

Keywords: Law Enforcement, Police, Narcotic